

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama pendanaan bagi pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah bahwa tiap daerah diharuskan mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas dalam rangka memberdayakan masyarakat. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa “Penyerahan sumber keuangan daerah berupa retribusi daerah maupaun dana perimbangan yang merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi. Dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, maka setiap daerah dituntut harus mempunyai sumber pendapatan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan serta kesejahteraan kepada rakyat pada daerah masing – masing. Pemberian sumber pendapatan dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah harus seimbang, hal ini menjelaskan bahwa ketika daerah mempunyai kemampuan pendapatan yang kurang mencukupi dalam membiayai urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan publik, maka pemerintahan pusat dapat menggunakan instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membantu daerah sesuai dengan prioritas Nasional yang ingin dicapai”.

Dari penjelasan diatas bahwa dalam pelaksanaan otonomi setiap daerah diharapkan mampu mandiri dalam hal pembiayaan pembangunan daerah maupun dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Sehingga diperlukan

regulasi yang dapat mempengaruhi pendapatan daerah yang khususnya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di berbagai sektor. Pemerintahan daerah bertanggung jawab dalam menggali potensi daerah serta mengembangkannya agar sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar dan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin kecil. Untuk mengetahui keberhasilan pembangunan perekonomian dan kinerja pemerintah tersebut maka dapat diamati melalui beberapa indikator yang dapat mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jumlah penduduk merupakan satu indikator penting dalam suatu Negara. Para ahli ekonomi klasik yang dipelopori Adam Smith menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar realisasi pendapatan asli daerah yang diterima oleh suatu kabupaten Tulungagung. Indikator lain yang mempengaruhi PAD adalah pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah tersebut, pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana semakin baik pertumbuhan PDRB pada suatu wilayah di periode tertentu maka akan semakin baik pula pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. PDRB merupakan penjumlahan nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi yang beroperasi pada wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu. Semakin meningkat pertumbuhan PDRB maka pendapatan asli daerah juga mengalami peningkatan, karena pendapatan masyarakat dengan pendapatan asli daerah menjadi tolak ukur.

Dalam pendapatan suatu wilayah atau daerah tentu memiliki penerimaan berupa pembayaran yang dilakukan masyarakat atas pelayanan atau peizinan yang diberikan kepada daerah baik secara langsung maupun tidak langsung, Pada tahun 2018, PAD Kabupaten Tulungagung tercatat sebesar Rp 559,8 miliar, yang mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai Rp 615,2 miliar pada tahun 2021. Namun, terdapat penurunan tajam pada tahun 2022 dengan realisasi PAD sebesar Rp 248,2 miliar, yang menunjukkan ketidakstabilan dalam pengelolaan pendapatan daerah hal ini sering disebut sebagai retribusi daerah yang juga memiliki pengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung menerima Penghargaan sebagai Kabupaten dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi ke 4 (empat) se-Indonesia pada tahun anggaran 2021 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM dalam acara Penganugerahan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah Tahun 2022 di Hotel Bidakara Jakarta Selatan. Penghargaan bergengsi itu merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras daerah yang berhasil menunjukkan kinerja dan pengelolaan APBD yang baik. Untuk Kabupaten Tulungagung sendiri bahkan berhasil melampaui target pendapatan yang ditetapkan sebanyak Rp 578 Miliar dengan realisasi 164 persen atau sebesar Rp 953 Miliar yang bersumber dari sektor pajak penerimaan yang sah, diantaranya penerimaan dari RSUD, PBB-P2, pariwisata dan lainnya (kabar.tulungagung.go.id).

Gambar 1.1 Grafik Pendapatan Asli Daerah per-Kabupaten tahun 2021 (%)



Sumber : BPS JATIM, 2021 (data diolah)

Pada tahun 2021, terjadi pemulihan yang cukup baik dengan pertumbuhan PAD kembali meningkat. Hal ini bisa diperhatikan pada grafik diatas dimana kabupaten Jawa Timur mengalami kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah COVID-19. Kabupaten Tulungagung masuk kedalam peringkat ke 4 dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 112% bisa disebut tinggi dikarenakan melebihi target dalam RKP (rencana kerja pemerintah) yang dimana harus >1% deviasi nilai target.

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya ialah jumlah penduduk, yang terus meningkat dapat mempengaruhi potensi pajak dan retribusi daerah. Salah satu masalah klasik kependudukan yang terjadi sekarang ini dan terus menjadi perhatian pemerintah jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung menurut hasil Susenas 2021 adalah 1.096.588 jiwa.

Jumlah ini menempatkan Kabupaten Tulungagung pada urutan ke 19 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Dari jumlah tersebut sekitar 534.561 jiwa atau sekitar 51,24 persen adalah penduduk perempuan dan sisanya sekitar 48,76 persen atau 508.621 jiwa adalah penduduk laki-laki. Jika dibandingkan dengan hasil Susenas tahun sebelumnya, jumlah penduduk tahun 2021 mengalami perkembangan sebesar 0,81 persen. Bila dibandingkan dengan sepuluh dekade sebelumnya yaitu pada tahun 2010, jumlah penduduk Tulungagung saat ini mengalami peningkatan sekitar 5,13 persen dari jumlah penduduk pada waktu pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 2010 yang sebesar 992.317 jiwa. Dengan kata lain, selama kurun waktu tersebut jumlah penduduk Tulungagung telah mengalami penambahan penduduk sebesar 50.865 jiwa. Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi oleh Tulungagung yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Ketimpangan distribusi penduduk terlihat jelas antara penduduk di desa dan kota. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, diharapkan ada peningkatan dalam jumlah wajib pajak dan retribusi yang dapat diperoleh pemerintah daerah. Namun, jika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan ekonomi, hal ini bisa mengakibatkan beban pada infrastruktur dan pelayanan publik.

Faktor kedua ialah pertumbuhan ekonomi, yang positif berkontribusi terhadap peningkatan PAD. Perekonomian Kabupaten Tulungagung pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,53 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan

dengan tahun 2020 yang terkontraksi secara dalam hingga menyentuh 3,09 persen. Setiap lapangan usaha tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif kecuali Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Kontraksi mendalam dialami oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang mencapai 3,30 persen dibandingkan dengan tahun 2020 yang mengalami pertumbuhan positif mencapai 8,14 persen. Lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami kontraksi sebesar 0,77 persen. (bps.go.id)

Data menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, meskipun ada penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang baik berpotensi meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi. Retribusi daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2021 adalah sebesar Rp20.602.266.523,00. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2020 sebesar Rp22.413.998.868,13. Angka ini merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung tahun 2020. Hal ini jelas terlihat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang terdampak COVID-19. Adapun beberapa Retribusi daerah dari sektor-sektor tertentu seperti retribusi pengujian kendaraan bermotor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Meskipun terdapat target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, realisasi sering kali tidak memenuhi harapan, terutama selama masa pandemi. Ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih baik dalam pengelolaan retribusi untuk memaksimalkan PAD.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2024 ”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Tulungagung periode Tahun 2015-2024 ?
2. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2024 ?
3. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2024 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Tulungagung
3. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Tulungagung

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian dapat dilakukan jika berjalan secara terarah dan fokus pada masalah yang akan diteliti, maka perlu adanya ruang lingkup penelitian yaitu penelitian menggambarkan pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Pengaruh jumlah penduduk yang dimaksud disini ialah pengaruh jumlah penduduk produktif yang telah terdata pada daerah tersebut serta hubungannya dengan pendapatan asli daerah. Daerah penelitian ini dilakukan di Tulungagung.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan salah satu tugas akhir S1 di Program Studi Ekonomi Pembangunan dan sebagai implementasi pengetahuan selama masa kuliah.
2. Bagi Universitas harapannya, penelitian ini akan memberikan referensi dan informasi bagi Universitas sebagai pengembangan untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian tentang masalah yang serupa.
3. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna dalam memahami pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Tulungagung, sehingga dapat digunakan sebagai pilihan pengambilan kebijakan di dalam perencanaan pembangunan daerah.
4. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan sebagai referensi untuk penelitian terkait dengan PAD, Retribusi Daerah, dan topik yang serupa.